

## Retribusi di Stadion Lang-Lang Bakal Diterapkan 2026



Sumber gambar: Kaltim Post Kamis, 16/01/2025

**BONTANG** - Penarikan retribusi bakal diterapkan di Stadion Bessai Berinta (Lang-Lang). Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Bontang, Rafidah mengatakan penarikan retribusi itu mengacu Peraturan Wali Kota (Perwali).

Menurutnya, kebijakan tersebut rencananya baru akan diterapkan 2026 mendatang. "Tahun ini akan disosialisasikan terlebih dahulu," katanya.

Sejatinya, wacana penarikan retribusi ini telah mencuat tahun lalu, ditujukan guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kala itu masih dalam tahap kajian termasuk di antaranya pemetaan sejumlah destinasi wisata yang bakal dikenakan tarif masuk.

Adapun retribusi turut menyoar para pedagang yang mengisi lapak di Pujasera, mengingat sebelumnya terdapat pembangunan Pujasera baru di dekat bangunan masjid.

Diketahui, Stadion Lang-Lang masih dalam masa pemeliharaan usai pembangunan rampung akhir tahun lalu. Ia menuturkan, perbaikan yang dilakukan juga menyoar sejumlah catatan dari DPRD Bontang. "Kami masih lakukan perbaikan sebelum retribusi diterapkan," pungkasnya. **(kpg/kri)**

### Sumber berita:

1. Kaltim Post, Retribusi di Stadion Lang-Lang Bakal Diterapkan 2026, 16/01/25

### Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009), retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2. Dalam Pasal 155 UU 28/2009 antara lain diatur sebagai berikut:
  - a. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
  - b. Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
  - c. Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.